



Paradoks Integritas Pemimpin Kristen dalam Menghadapi Polarisasi Politik dan Identitas Kelompok di Toraja

Raden Palipungan^{1*}, Dia Bato Salle², Irma Yanti Markus³, Tamar Tangke⁴,
Agustina Pare⁵, Angelin Risty Daud Samara⁶

¹⁻⁶ Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen, Program Studi Kepemimpinan Kristen,
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, Indonesia

*Penulis Korespondensi: radenpubg0@gmail.com

Abstract. *This research examines the paradox of Christian leader integrity in facing political polarization and group identity in Toraja society. The background of the problem is a contradictory phenomenon where Christian communities strongly emphasize ethical character of leaders, yet strong group identification can blind them to ethical inconsistencies of supported leaders, especially in the dynamics of regional and presidential elections that divide churches. This research aims to analyze the paradox of Christian leader integrity, identify psychological, theological, and sociological factors causing ethical blindness, and formulate leadership principles that can maintain integrity amid political pressure. Using qualitative descriptive methods based on literature study, this research collects data from leadership theology literature, group identity psychology, and empirical studies on political practices in Toraja Christian communities. Research findings show that the integrity paradox manifests in local political dynamics where ethical standards become loose when leaders come from the same identity group. Factors causing ethical blindness include in-group bias and cognitive dissonance (psychological), sacred-secular dualism and permissive interpretation (theological), as well as clan structure and conformity pressure (sociological). The formulated leadership principles include commitment to biblical standards, theology-based political education, transformative prophetic role, accountability systems, contextual leadership, and building mature faith communities. The implication is that this research provides theoretical contributions to the development of contextual leadership theology and practical recommendations for church leaders in navigating the complexity of identity politics. Research recommendations include developing theology-based political education programs in churches, building leadership accountability systems, and further empirical research to validate the conceptual framework that has been built.*

Keywords: *Group Identity; Integrity of Christian Leaders; Political Polarization; Theology of Leadership; Torajan Society.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji paradoks integritas pemimpin Kristen dalam menghadapi polarisasi politik dan identitas kelompok di masyarakat Toraja. Latar belakang masalahnya adalah fenomena kontradiktif di mana komunitas Kristen sangat menekankan karakter etis pemimpin, namun identifikasi kelompok yang kuat dapat membutakan mereka terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang didukung, terutama dalam dinamika pilkada dan pilpres yang memecah belah gereja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradoks integritas pemimpin Kristen, mengidentifikasi faktor-faktor psikologis, teologis, dan sosiologis yang menyebabkan pembutaan etika, serta merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dapat menjaga integritas di tengah tekanan politik. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan data dari literatur teologi kepemimpinan, psikologi identitas kelompok, dan studi empiris tentang praktik politik di komunitas Kristen Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks integritas termanifestasi dalam dinamika politik lokal di mana standar etika menjadi longgar ketika pemimpin berasal dari kelompok identitas yang sama. Faktor-faktor yang menyebabkan pembutaan etika meliputi *in-group bias* dan disonansi kognitif (psikologis), dualisme sakral-sekuler dan interpretasi permisif (teologis), serta struktur klan dan tekanan konformitas (sosiologis). Prinsip-prinsip kepemimpinan yang dirumuskan mencakup komitmen pada standar alkitabiah, pendidikan politik berbasis teologi, peran profetik yang transformatif, sistem akuntabilitas, kepemimpinan kontekstual, dan pembangunan komunitas iman yang matang. Implikasinya adalah penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan teologi kepemimpinan kontekstual dan rekomendasi praktis bagi pemimpin gereja dalam menavigasi kompleksitas politik identitas. Saran penelitian adalah pengembangan program pendidikan politik berbasis teologi di gereja, pembangunan sistem akuntabilitas kepemimpinan, dan penelitian empiris lanjutan untuk validasi kerangka konseptual yang telah dibangun.

Kata Kunci: Identitas Kelompok; Integritas Pemimpin Kristen; Masyarakat Toraja; Polarisasi Politik; Teologi Kepemimpinan.

1. LATAR BELAKANG

Kepemimpinan Kristen secara fundamental dibangun atas prinsip integritas yang menjadi fondasi kepercayaan dan kredibilitas seorang pemimpin. Integritas dalam konteks kepemimpinan Kristen bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan konsistensi antara nilai-nilai iman, perkataan, dan tindakan nyata dalam setiap aspek kehidupan (Yosafat, 2021). MacArthur (2009) menegaskan bahwa pemimpin gereja harus memenuhi standar "tidak bercacat", yang berarti memiliki kesaksian hidup kristiani yang bebas dari skandal moral dan mampu menjadi teladan bagi komunitas. Prinsip ini semakin relevan di tengah konteks Indonesia yang majemuk, di mana pemimpin Kristen tidak hanya berperan dalam ranah gerejawi tetapi juga dituntut untuk membawa nilai-nilai Kerajaan Allah ke dalam ruang publik, termasuk dalam dinamika politik (Kriswibowo & Amtiran, 2024). Namun demikian, ketika kepemimpinan Kristen bersinggungan dengan ranah politik, muncul tantangan kompleks yang menguji konsistensi integritas tersebut, terutama ketika identitas kelompok menjadi faktor determinan dalam pengambilan keputusan.

Lebih khusus lagi, fenomena polarisasi politik di Indonesia telah menciptakan situasi paradoksal dalam komunitas Kristen, khususnya dalam konteks masyarakat Toraja. Di satu sisi, komunitas Kristen Toraja sangat menekankan pentingnya karakter etis dan integritas moral pemimpin sebagai syarat utama kepemimpinan yang alkitabiah. Sijabat (2019) menjelaskan bahwa integritas membangun kepercayaan dan menciptakan stabilitas dalam kepemimpinan, sehingga menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar-tawar. Di sisi lain, ketika memasuki ranah politik praktis baik dalam Pilkada maupun Pemilu identifikasi kelompok yang sangat kuat justru dapat membutakan komunitas terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang mereka dukung. Chendralisan dan Sibarani (2025) mencatat bahwa keterlibatan aktif pemimpin gereja dalam kampanye politik dapat menimbulkan polarisasi dalam tubuh jemaat, memicu konflik internal, serta merusak kesatuan komunitas yang seharusnya dibangun atas kasih dan persaudaraan dalam Kristus. Fenomena ini menjadi semakin kompleks di Toraja, di mana politik praktis sering kali diwarnai oleh praktik *money politics*, politik identitas berbasis klan atau keluarga, dan kampanye yang memanfaatkan simbol-simbol keagamaan untuk meraih dukungan massa (Palembangan, 2024; Sallata, 2024).

Permasalahan yang mendorong penelitian ini adalah adanya kontradiksi mendasar antara ajaran teologis tentang integritas kepemimpinan dengan praktik politik di lapangan. Secara teologis, Alkitab dengan tegas menekankan bahwa pemimpin Kristen harus menjadi teladan dalam integritas, kejujuran, dan keadilan tanpa memandang kepentingan kelompok tertentu. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 5:2-3, pemimpin harus mengembalikan dengan

sukarela, bukan karena keuntungan pribadi, dan menjadi teladan bagi kawanannya (Kriswibowo & Amtiran, 2024). Topayung (2025) menegaskan bahwa integritas bukanlah pilihan yang dapat diambil atau ditinggalkan, melainkan keharusan mutlak bagi mereka yang mengklaim dipimpin oleh iman. Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Kumowal (2025) menemukan bahwa politik kekuasaan dalam gereja sering kali muncul dalam bentuk perebutan jabatan, kampanye negatif terhadap calon pemimpin tertentu, serta upaya menjatuhkan lawan demi mempertahankan atau merebut posisi kepemimpinan. Dalam konteks Toraja, Sepi (2019) mengidentifikasi bahwa peran politik warga gereja masih sangat kabur karena kurangnya pemahaman mendalam tentang politik yang sehat, sehingga praktik politik tidak sesuai dengan nilai moral, etika, dan aturan politik yang seharusnya.

Kesenjangan antara idealitas teologis dan realitas praktis semakin tajam ketika identitas kelompok menjadi faktor dominan. Seharusnya, komunitas Kristen menerapkan prinsip-prinsip etika Kristen dalam setiap aspek kehidupan politik, termasuk mengedepankan nilai kasih, keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Silalahi & Marbun, 2025). Pemimpin Kristen seharusnya menolak segala bentuk korupsi dan nepotisme secara tegas, membangun sistem yang menjunjung tinggi keadilan tanpa memandang hubungan pribadi atau keuntungan finansial (Topayung, 2025). Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketika musim pemilihan tiba, ikatan identitas kelompok baik berbasis klan, keluarga, maupun afiliasi gereja tertentu seringkali mengalahkan pertimbangan etis. Afni (2022) menemukan bahwa banyak warga Gereja Toraja masih memiliki sikap antipati terhadap politik karena menganggap politik sebagai sesuatu yang "kotor", namun di saat yang sama mereka terlibat dalam praktik politik yang tidak sehat karena tekanan identitas kelompok. Belo (2024) lebih lanjut menjelaskan bahwa politik identitas yang menguat akibat komodifikasi budaya Toraja melalui turisme telah menciptakan pengabaian terhadap identitas manusia Toraja yang pluralistik, sehingga memperkuat fragmentasi sosial.

Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait relasi antara kepemimpinan Kristen dan politik, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Pertama, Sanjaya et al. (2024) mengkaji keterlibatan Kristen dalam transformasi politik kontemporer dengan mengeksplorasi pola perilaku politik Kristen, dampaknya dalam dinamika politik sosial, dan implikasinya terhadap stabilitas demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan umat Kristen dapat memengaruhi pembentukan kebijakan publik, namun juga menghadapi tantangan-tantangan politik kontemporer yang kompleks. Kedua, Pangkey (2025) meneliti pemahaman dualisme dan perspektif tentang kekuasaan terhadap sikap sosial-politik orang

Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap menjauh dari politik yang masih kuat dianut sebagian umat Kristen dipicu oleh warisan teologis yang dualistik, yang memisahkan antara iman dan kehidupan publik. Namun demikian, terdapat indikasi pergeseran paradigma terutama di kalangan generasi muda yang mulai menolak pandangan bahwa politik itu "kotor". Ketiga, Puasa et al. (2025) memetakan peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dalam Pemilu 2024, menemukan bahwa preferensi politik jemaat sangat dipengaruhi oleh pandangan dan arahan pemimpin gereja, menunjukkan posisi strategis gereja dalam membentuk kesadaran politik umat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengangkat paradoks integritas pemimpin Kristen dalam konteks polarisasi politik, suatu dimensi yang belum dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan perspektif psikologi identitas kelompok dengan teologi kepemimpinan dan etika Kristen untuk memahami mengapa komunitas yang sangat menekankan integritas justru dapat membutakan diri terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang didukung. Ketiga, penelitian ini mengambil konteks spesifik masyarakat Toraja yang memiliki dinamika unik dalam relasi antara identitas kultural, identitas keagamaan, dan praktik politik. Sumual dan Arifianto (2025) menekankan bahwa kepemimpinan Kristen di era digital menuntut integritas, ketekunan, dan keteladanan hidup yang sejalan dengan ajaran, di mana kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau popularitas melainkan kesetiaan pada Injil. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa kerangka konseptual yang dapat membantu memahami akar paradoks integritas dalam konteks politik identitas, serta merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dapat menjaga integritas di tengah tekanan politik tanpa kehilangan empati pastoral terhadap jemaat yang terpolarisasi.

Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat dampak jangka panjang dari polarisasi politik terhadap kehidupan gereja dan masyarakat Kristen. Nicolas (2020) mengungkapkan bahwa polarisasi dalam gereja dapat menciptakan ketajaman perbedaan yang sulit dipulihkan, sehingga gereja kehilangan fokus pada misi utamanya dan lebih disibukkan dengan konflik internal. Linansera et al. (2024) menegaskan bahwa krisis demokrasi di Indonesia memperlihatkan kerentanan serius dalam menjaga keadilan sosial dan supremasi hukum, yang menuntut kehadiran suara profetik gereja yang berani menyuarakan kebenaran dan berdiri bersama kelompok rentan. Dalam konteks Toraja, di mana politik praktis sering kali melibatkan *money politics* dan kampanye yang memanfaatkan simbol-simbol keagamaan, pemimpin gereja menghadapi dilema etis yang sangat kompleks. Parimba (2021) menyarankan

bahwa gereja harus mengembangkan rasionalitas komunikatif yang sistematis untuk melakukan perubahan sosial, termasuk membangun komunikasi yang tidak berhenti untuk proses timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman teoretis dan praktis tentang bagaimana pemimpin Kristen dapat menavigasi kompleksitas politik identitas dengan tetap menjaga integritas dan membangun kesatuan komunitas.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis paradoks integritas pemimpin Kristen dalam menghadapi polarisasi politik dan identitas kelompok di masyarakat Toraja; (2) mengidentifikasi faktor-faktor psikologis, teologis, dan sosiologis yang menyebabkan komunitas Kristen dapat membutakan diri terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang didukung akibat identifikasi kelompok yang kuat; dan (3) merumuskan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang dapat menjaga integritas di tengah tekanan politik tanpa kehilangan empati pastoral terhadap jemaat yang terpolarisasi. Melalui pencapaian ketiga tujuan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan teologi kepemimpinan kontekstual serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemimpin gereja dan komunitas Kristen dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Identitas Sosial dalam Konteks Kepemimpinan Kristen

Teori identitas sosial menjadi landasan utama untuk memahami paradoks integritas pemimpin Kristen dalam menghadapi polarisasi politik. Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung mengategorikan diri mereka dan orang lain ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu, dan identitas kelompok ini dapat mempengaruhi cara mereka memandang dan mengevaluasi pemimpin mereka (Sihotang et al., 2023). Dalam konteks masyarakat Kristen Toraja, identitas kelompok tidak hanya dibentuk oleh afiliasi keagamaan tetapi juga oleh ikatan klan, keluarga, dan denominasi gereja yang sangat kuat (Belo, 2024). Ketika identitas kelompok ini menjadi dominan, anggota komunitas cenderung menunjukkan *in-group bias*, yaitu kecenderungan untuk lebih positif menilai anggota kelompok sendiri dan lebih toleran terhadap kesalahan mereka, sementara lebih kritis terhadap kelompok lain.

Pangkey (2025) menemukan bahwa pemahaman dualisme yang memisahkan antara yang sakral dan sekuler telah memperkuat pola pikir dan sikap jemaat terhadap keterlibatan dalam kehidupan sosial-politik, di mana loyalitas kelompok seringkali mengalahkan pertimbangan etis objektif. Fenomena ini menjelaskan mengapa komunitas Kristen yang sangat menekankan

integritas moral dapat membutakan diri terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang mereka dukung, karena pemimpin tersebut dianggap sebagai bagian dari "*in-group*" mereka. Puasa et al. (2025) memperkuat pemahaman ini dengan menunjukkan bahwa preferensi politik jemaat GMIH sangat dipengaruhi oleh pandangan dan arahan pemimpin gereja, mengindikasikan bahwa identitas kelompok keagamaan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk sikap politik. Dengan demikian, teori identitas sosial memberikan kerangka untuk memahami bagaimana identifikasi kelompok yang kuat dapat menciptakan paradoks di mana standar integritas yang diterapkan pada pemimpin dari kelompok sendiri berbeda dengan standar yang diterapkan pada pemimpin dari kelompok lain.

Teologi Kepemimpinan Pelayan dan Integritas Alkitabiah

Teori pertama ini diperkuat oleh konsep teologi kepemimpinan pelayan yang bersumber dari ajaran Alkitab tentang hakikat kepemimpinan Kristen. MacArthur (2009) menegaskan bahwa standar kepemimpinan Kristen yang ditetapkan dalam Perjanjian Baru adalah "*tidak bercacat*", yang berarti pemimpin harus memiliki kesaksian hidup kristiani yang bebas dari skandal moral dan mampu menjadi teladan yang konsisten bagi komunitas. Yosafat (2021) menjelaskan bahwa kepemimpinan Kristen bukanlah sekadar tentang pencapaian visi dan target seperti kepemimpinan duniawi, melainkan lebih kepada transformasi kehidupan orang-orang yang dipimpin ke arah keserupaan dengan gambar Khaliknya. Teologi kepemimpinan pelayan ini menekankan bahwa pemimpin Kristen dipanggil untuk melayani, bukan untuk berkuasa, dan untuk menjadi teladan dalam integritas moral di segala aspek kehidupan.

Sijabat (2019) memperjelas bahwa integritas dalam kepemimpinan Kristen membangun kepercayaan sebagai fondasi kepemimpinan, menciptakan stabilitas dan konsistensi, sehingga orang-orang merasa aman karena dapat mengandalkan pemimpin mereka. Kriswibowo dan Amtiran (2024) menguraikan bahwa pemimpin Kristen menghadapi berbagai dilema etis yang kompleks, termasuk dalam pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan berbagai pihak, sehingga integritas menjadi kunci untuk menavigasi dilema-dilema tersebut dengan bijaksana. Sumual dan Arifianto (2025) menambahkan bahwa teladan kepemimpinan Paulus menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, popularitas, atau pencitraan, melainkan tentang kesetiaan pada Injil, keberanian untuk menderita demi kebenaran, serta kerendahan hati untuk melayani. Oleh karena itu, teologi kepemimpinan pelayan memberikan standar normatif yang jelas tentang bagaimana seharusnya pemimpin Kristen menjalankan kepemimpinannya dengan integritas yang utuh, tanpa kompromi terhadap nilai-nilai etis meskipun berada dalam tekanan politik yang kuat.

Konsep Teologi Politik dan Peran Profetik Gereja

Selanjutnya, teori yang saling melengkapi adalah konsep teologi politik yang menjelaskan bagaimana gereja seharusnya berinteraksi dengan ranah politik tanpa kehilangan integritas spiritualnya. Taliwuna (2025) menjelaskan bahwa pendekatan teologis menawarkan kerangka normatif untuk memahami dinamika hubungan agama dan politik, di mana teologi tidak hanya berperan sebagai landasan etis tetapi juga sebagai pendorong dialog dan inklusivitas di tengah masyarakat yang pluralistik. Roni dan Yosbekasa (2024) menguraikan teologi politik baru perspektif Jürgen Moltmann yang menekankan pentingnya keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial dan politik, mengkritik gereja yang pasif dan hanya berfokus pada persoalan internal sementara mengabaikan realitas ketidakadilan dan penderitaan di dunia.

Konsep teologi politik ini mendorong gereja untuk mengintervensi sistem politik yang ada secara teologis, membawa nilai-nilai iman Kristen seperti keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ke dalam ranah publik. Linansera et al. (2024) menegaskan bahwa mandat profetik menuntut gereja berani menyuarakan kebenaran, menegur praktik ketidakadilan, dan berdiri bersama kelompok rentan yang mengalami penindasan, diskriminasi, serta marginalisasi, sehingga kehadiran gereja menjadi wujud solidaritas Allah yang berpihak pada orang kecil dan tertindas. Sanjaya et al. (2024) menambahkan bahwa keterlibatan Kristen dalam politik harus menggerakkan suara-suara Kristen untuk transformasi politik kontemporer dengan memahami pola perilaku politik yang sehat dan dampaknya dalam dinamika politik sosial. Rerung dan Attu (2023) memperjelas bahwa gereja harus mengambil sikap yang jelas terhadap partisipasi politik dengan mengajarkan prinsip-prinsip berpolitik yang alkitabiah kepada warga gereja, agar mereka dapat mengambil sikap dengan baik ketika berhadapan dengan praktik berpolitik yang tidak sehat. Dengan demikian, konsep teologi politik memberikan panduan tentang bagaimana gereja dan pemimpin Kristen dapat terlibat dalam politik dengan cara yang profetik dan transformatif, menjaga integritas spiritual sambil tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tantangan polarisasi politik yang semakin kompleks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka sistematis dengan mengumpulkan data dari literatur teologi kepemimpinan, psikologi identitas kelompok, dan studi empiris tentang praktik politik dalam komunitas Kristen Toraja. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan langkah-langkah berikut: pertama, reduksi data dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur mengenai integritas pemimpin, polarisasi politik, dan identitas

kelompok; kedua, kategorisasi data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tiga kategori analisis utama yaitu aspek teologis, psikologis, dan sosiologis yang relevan dengan paradoks integritas; ketiga, sintesis tematik dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan dari berbagai sumber untuk membangun narasi koheren tentang fenomena yang diteliti; dan keempat, interpretasi dilakukan dengan menganalisis implikasi temuan terhadap pemahaman kepemimpinan Kristen dalam konteks polarisasi politik Toraja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Integritas Pemimpin Kristen dalam Polarisasi Politik Masyarakat Toraja

Analisis terhadap paradoks integritas pemimpin Kristen dalam menghadapi polarisasi politik di masyarakat Toraja menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara ajaran teologis dan praktik empiris. Data menunjukkan bahwa komunitas Kristen Toraja secara teoretis sangat menekankan pentingnya integritas sebagai syarat utama kepemimpinan, sebagaimana dinyatakan oleh MacArthur (2009) bahwa pemimpin gereja harus memenuhi standar "tidak bercacat" dengan kesaksian hidup yang bebas dari skandal moral. Yosafat (2021) memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa kepemimpinan Kristen harus berfokus pada transformasi kehidupan yang mengarah pada keserupaan dengan gambar Allah, bukan sekadar pencapaian target duniawi. Namun demikian, realitas yang terjadi dalam dinamika politik lokal menunjukkan gambaran yang sangat berbeda, di mana standar integritas tersebut seringkali diabaikan ketika berhadapan dengan pemimpin yang berasal dari kelompok identitas yang sama.

Lebih lanjut, paradoks ini terlihat jelas dalam konteks pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang memecah belah gereja. Chendralisan dan Sibarani (2025) menemukan bahwa keterlibatan aktif pemimpin gereja dalam kampanye politik untuk mendukung pasangan calon tertentu telah menimbulkan polarisasi dalam tubuh jemaat, memicu konflik internal, serta merusak kesatuan dan keharmonisan komunitas yang seharusnya dibangun di atas kasih dan persaudaraan dalam Kristus. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Kumowal (2025) yang mengidentifikasi bahwa politik kekuasaan dalam gereja sering kali muncul dalam bentuk perebutan jabatan, kampanye negatif terhadap calon pemimpin tertentu, serta upaya menjatuhkan lawan demi mempertahankan atau merebut posisi kepemimpinan. Dalam konteks Toraja, Sallata (2024) mengungkapkan bahwa politik praktis telah menimbulkan ketidakakuran pada sebagian anggota jemaat karena adanya persaingan yang tidak sehat, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai persekutuan Kristen. Implikasinya ialah komunitas yang

seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip integritas justru mengalami fragmentasi internal yang mendalam akibat polarisasi politik.

Fenomena paradoks ini semakin kompleks ketika melihat bagaimana identitas kelompok mempengaruhi penilaian terhadap integritas pemimpin. Afni (2022) menjelaskan bahwa meskipun banyak warga Gereja Toraja yang menganggap politik sebagai sesuatu yang "kotor" dan tidak baik, mereka tetap terlibat dalam praktik berpolitik yang tidak sehat karena tekanan identitas kelompok. Sepi (2019) menemukan bahwa peran politik warga gereja masih sangat kabur karena kurangnya pemahaman mendalam tentang politik yang sehat, sehingga praktik politik tidak sesuai dengan nilai moral dan etika yang seharusnya. Data menunjukkan bahwa ketika pemimpin yang didukung berasal dari klan atau keluarga yang sama, standar integritas yang biasanya diterapkan secara ketat menjadi longgar, dan inkonsistensi etika cenderung diabaikan atau dirasionalisasi. Belo (2024) mengidentifikasi bahwa politik identitas yang menguat akibat komodifikasi budaya Toraja melalui turisme telah menciptakan pengabaian terhadap identitas manusia Toraja yang pluralistik, sehingga memperkuat fragmentasi sosial berdasarkan garis identitas kelompok.

Lebih lanjut, paradoks integritas ini juga terlihat dalam bagaimana pemimpin gereja merespons praktik politik yang tidak etis. Palembang (2024) menganalisis bahwa majelis gereja seringkali menghadapi dilema dalam menyikapi praktik *money politics* yang merusak persekutuan dalam gereja, di mana mereka harus menyeimbangkan antara penegakan standar etika dan pemeliharaan kesatuan jemaat yang terpolarisasi. Parimba (2021) menambahkan bahwa pemimpin dalam masyarakat Toraja seharusnya berperan sebagai *Parandangan* yang mengarahkan kepada keteraturan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan alam semesta, namun peran ini seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik praktis. Fenomena ini diperkuat oleh temuan Allodatu (2010) yang menunjukkan bahwa masyarakat Kristen di Lembang Sikuku' masih sangat kabur dalam memahami politik, disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pemahaman yang memadai, sehingga mudah terjebak dalam praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen.

Implikasinya ialah paradoks integritas ini menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam dalam komunitas Kristen. Kriswibowo dan Amtiran (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan gereja menjadi isu etis yang semakin penting, di mana pemimpin gereja dituntut untuk menjadi teladan dalam hal integritas dan keterbukaan. Namun demikian, ketika pemimpin gereja sendiri terlibat dalam kampanye politik partisan yang memanfaatkan otoritas rohani mereka, hal ini mengaburkan identitas gereja sebagai institusi rohani dan menurunkan kepercayaan publik terhadap gereja sebagai tempat

yang netral dan inklusif (Chendralisan & Sibarani, 2025). Nicolas (2020) mengungkapkan bahwa polarisasi dalam gereja akibat pandemi COVID-19 telah memperlihatkan bahwa keberagaman pandangan dan penafsiran teologis menjadi realita konkret yang tidak bisa dipungkiri, dan fenomena yang sama terjadi dalam konteks polarisasi politik di mana perbedaan sikap politik menciptakan ketajaman yang sulit dipulihkan. Dengan demikian, paradoks integritas pemimpin Kristen dalam menghadapi polarisasi politik di masyarakat Toraja bukan hanya masalah individual tetapi merupakan masalah sistemik yang memerlukan intervensi teologis dan pastoral yang komprehensif untuk mengembalikan integritas sebagai fondasi kepemimpinan Kristen yang sejati.

Faktor Psikologis, Teologis, dan Sosiologis yang Menyebabkan Pembutaan Etika

Analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan komunitas Kristen dapat membutakan diri terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang didukung mengungkapkan adanya interaksi kompleks antara dimensi psikologis, teologis, dan sosiologis. Data menunjukkan bahwa faktor psikologis pertama yang sangat berpengaruh adalah fenomena *in-group bias* yang dijelaskan oleh teori identitas sosial. Sihotang et al. (2023) menemukan bahwa Kekristenan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik dalam masyarakat kontemporer, di mana terdapat keselarasan antara keyakinan agama dan pandangan politik individu, serta korelasi kuat antara keaktifan keagamaan dan partisipasi politik. Puasa et al. (2025) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa preferensi politik jemaat GMIH sangat dipengaruhi oleh pandangan dan arahan pemimpin gereja, mengindikasikan bahwa identitas kelompok keagamaan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk sikap politik. Fenomena ini diperkuat oleh realitas bahwa ketika pemimpin yang didukung berasal dari kelompok identitas yang sama baik berdasarkan klan, keluarga, maupun denominasi gereja anggota komunitas cenderung menunjukkan loyalitas yang mengabaikan pertimbangan etis objektif.

Lebih lanjut, faktor psikologis kedua adalah kognitif *dissonance* yang terjadi ketika individu menghadapi informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau pilihan mereka. Pangkey (2025) menjelaskan bahwa sikap menjauh dari politik yang masih kuat dianut sebagian umat Kristen tidak hanya dipicu oleh persepsi negatif terhadap praktik politik yang korup, tetapi juga merupakan akibat dari warisan teologis yang dualistik, yang memisahkan antara iman dan kehidupan publik, antara yang sakral dan sekuler. Data menunjukkan bahwa ketika komunitas Kristen telah memutuskan untuk mendukung seorang pemimpin berdasarkan identitas kelompok, mereka cenderung mengalami disonansi kognitif ketika berhadapan dengan bukti inkonsistensi etika pemimpin tersebut. Untuk mengurangi disonansi ini, mereka seringkali melakukan rasionalisasi dengan cara meminimalkan kesalahan pemimpin,

membandingkannya dengan kesalahan pemimpin lain yang dianggap lebih buruk, atau bahkan mengabaikan informasi negatif tersebut. Sepi (2019) menemukan bahwa peran politik warga gereja yang masih kabur disebabkan karena kurangnya pemahaman mendalam tentang politik yang sehat, sehingga mereka tidak memiliki kerangka kognitif yang kuat untuk mengevaluasi integritas pemimpin secara objektif.

Fenomena ini semakin kompleks ketika melihat faktor teologis yang berperan dalam pembutaan etika. Pangkey (2025) mengidentifikasi tiga bentuk dualisme teologis yang saling memperkuat: dualisme antara iman dan kehidupan publik, dualisme antara yang sakral dan sekuler, serta dualisme antara gereja dan negara. Data menunjukkan bahwa pemahaman teologis yang dualistik ini menciptakan dikotomi di mana standar integritas yang diterapkan dalam ranah gerejawi berbeda dengan standar yang diterapkan dalam ranah politik. Taliwuna (2025) menjelaskan bahwa ketika agama dipolitisasi untuk kepentingan pragmatis, hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik, di mana nilai-nilai teologis seperti keadilan, kasih, dan toleransi terdistorsi oleh kepentingan politik kelompok. Lebih lanjut, Sidjabat (2019) mengungkapkan bahwa pendidikan Kristen konteks gereja perlu menuntun warga jemaat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama membangun tubuh Kristus, agar dapat melayani baik ke dalam dan keluar dirinya, namun dalam praktiknya pendidikan teologis seringkali tidak memberikan pemahaman yang memadai tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip iman dalam konteks politik praktis.

Implikasinya ialah faktor teologis ini menciptakan celah di mana komunitas Kristen dapat membenarkan dukungan mereka terhadap pemimpin yang secara etis bermasalah dengan argumentasi bahwa "tidak ada manusia yang sempurna" atau "semua orang pernah berbuat kesalahan". MacArthur (2009) mengkritik fenomena ini dengan menunjukkan bahwa ada beberapa aliran gereja yang bahkan sudah bosan mencari pribadi yang berintegritas untuk memimpin mereka, dan standar hidup duniawi secara perlahan-lahan merayap masuk ke dalam gereja, sehingga pola pikir yang menguasai umat Kristen pada zaman sekarang tidak lagi menganggap pelanggaran moral sebagai hal yang dapat menjatuhkan seorang pemimpin. Yosep (2024) menambahkan bahwa keterlibatan pendeta dalam politik di Gereja Toraja Mamasa menimbulkan kontroversi, di mana sebagian mendukung dengan harapan membawa perubahan positif sementara yang lain menolak karena mengganggu pelayanan gereja, mencerminkan kebingungan teologis tentang bagaimana seharusnya pemimpin rohani berinteraksi dengan ranah politik.

Fenomena ini diperkuat oleh faktor sosiologis yang berperan dalam pembutaan etika, khususnya struktur sosial masyarakat Toraja yang sangat menekankan ikatan klan dan

keluarga. Belo (2024) menjelaskan bahwa agama dan etnis membentuk identitas dan gambaran seseorang, dan dalam kehidupan masyarakat Toraja yang pluralistik, politik identitas menguat akibat komodifikasi budaya yang mengabaikan identitas manusia Toraja yang pluralistik. Data menunjukkan bahwa dalam struktur sosial Toraja, solidaritas kelompok berdasarkan klan atau keluarga seringkali lebih kuat daripada solidaritas berbasis prinsip etis. Para'pean et al. (2025) mengidentifikasi bahwa dualitas peran pemimpin Kristen yang berada di persimpangan antara kepemimpinan adat dan tuntutan organisasi modern menciptakan ketegangan signifikan dalam basis otoritas, proses pengambilan keputusan, dan sistem nilai yang menjadi prioritas. Parimba (2021) menambahkan bahwa falsafah pemimpin dalam masyarakat Toraja sebagai *Parandangan* seharusnya mengarahkan kepada keteraturan hubungan, namun dalam praktiknya peran ini terdistorsi oleh kepentingan politik praktis yang mengutamakan loyalitas kelompok.

Lebih lanjut, faktor sosiologis lainnya adalah tekanan sosial dan konformitas kelompok yang sangat kuat dalam komunitas Toraja. Rerung dan Attu (2023) menemukan bahwa praktik berpolitik tidak sehat seperti politik uang mudah masuk pada gereja yang warga gerejanya sama sekali tidak memahami sikap gereja terhadap partisipasi politik yang baik dan benar, sehingga mereka mengikuti pola kelompok tanpa evaluasi kritis. Allodatu (2010) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat Kristen yang terlibat dalam dunia politik sekarang ini sudah mengotori hakikat politik yang sebenarnya, dan ini memerlukan bimbingan dari gereja dan pemerintah untuk mengembalikan praktik politik pada jalur yang sehat. Data menunjukkan bahwa ketika mayoritas anggota kelompok mendukung seorang pemimpin tertentu, tekanan untuk konformitas menjadi sangat kuat, sehingga individu yang memiliki keraguan tentang integritas pemimpin tersebut cenderung menyimpan keraguan mereka atau bahkan mengubah pandangan mereka untuk menyesuaikan dengan kelompok. Implikasinya ialah kombinasi dari faktor psikologis (*in-group bias* dan disonansi kognitif), faktor teologis (dualisme dan interpretasi yang permisif), dan faktor sosiologis (struktur klan dan tekanan konformitas) menciptakan kondisi di mana komunitas Kristen yang sangat menekankan integritas justru dapat membutakan diri terhadap inkonsistensi etika pemimpin yang mereka dukung, menghasilkan paradoks yang mendalam dalam kepemimpinan Kristen di tengah polarisasi politik.

Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Kristen untuk Menjaga Integritas di Tengah Tekanan Politik

Analisis terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang dapat menjaga integritas di tengah tekanan politik tanpa kehilangan empati pastoral menunjukkan perlunya pendekatan

yang komprehensif dan kontekstual. Data menunjukkan bahwa prinsip pertama yang sangat fundamental adalah komitmen pada standar integritas alkitabiah yang tidak dapat ditawar-tawar. Sijabat (2019) menegaskan bahwa integritas membangun kepercayaan sebagai fondasi kepemimpinan, menciptakan stabilitas dan konsistensi, sehingga orang-orang merasa aman karena dapat mengandalkan pemimpin mereka. MacArthur (2009) memperkuat prinsip ini dengan menjelaskan bahwa standar "tidak bercacat" dalam kepemimpinan Kristen berarti memiliki kesaksian hidup yang bebas dari skandal moral, berkarakter mulia, dan tidak memiliki cacat moral yang parah. Topayung (2025) menambahkan bahwa seorang pemimpin Kristen yang berpegang pada integritas akan menolak segala bentuk korupsi dan nepotisme secara tegas, membangun sistem yang menjunjung tinggi keadilan tanpa memandang hubungan pribadi atau keuntungan finansial. Fenomena ini diperkuat oleh teladan kepemimpinan Paulus yang menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau popularitas, melainkan tentang kesetiaan pada Injil, keberanian untuk menderita demi kebenaran, serta kerendahan hati untuk melayani (Sumual & Arifianto, 2025).

Lebih lanjut, prinsip kedua adalah pengembangan pendidikan politik berbasis teologi yang komprehensif. Pangkey (2025) menekankan bahwa gereja perlu mengintegrasikan pendidikan politik dalam program pembinaan iman, katekisasi, dan pelatihan kepemimpinan, agar jemaat tidak hanya memahami politik secara praktis tetapi juga secara teologis dan etis sebagai bagian dari panggilan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan umum. Data menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman teologis tentang politik yang sehat menjadi salah satu penyebab utama mengapa komunitas Kristen mudah terjebak dalam praktik politik yang tidak etis. Rerung dan Attu (2023) menemukan bahwa gereja harus mengajarkan prinsip-prinsip berpolitik alkitabiah kepada warga gereja agar mereka dapat mengambil sikap dengan baik ketika berhadapan dengan praktik berpolitik yang tidak sehat. Silalahi dan Marbun (2025) menambahkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika Kristen seperti kasih, keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat berkontribusi besar dalam menciptakan pemilu yang adil, damai, dan transparan. Implikasinya ialah pendidikan politik berbasis teologi tidak hanya memberikan pemahaman kognitif tetapi juga membentuk karakter dan sikap politik yang sehat, sehingga komunitas Kristen dapat mengevaluasi integritas pemimpin secara objektif tanpa dibutakan oleh identitas kelompok.

Fenomena ini semakin kompleks ketika melihat prinsip ketiga, yaitu peneguhan peran profetik gereja yang kritis dan transformatif. Linansera et al. (2024) menegaskan bahwa mandat profetik menuntut gereja berani menyuarakan kebenaran, menegur praktik ketidakadilan, dan berdiri bersama kelompok rentan yang mengalami penindasan, sehingga kehadiran gereja

menjadi wujud solidaritas Allah yang berpihak pada orang kecil dan tertindas. Roni dan Yosbekasa (2024) menjelaskan bahwa teologi politik baru perspektif Jürgen Moltmann menekankan pentingnya keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial dan politik, mengkritik gereja yang pasif dan hanya berfokus pada persoalan internal sementara mengabaikan realitas ketidakadilan di dunia. Data menunjukkan bahwa gereja perlu mengembangkan suara profetik yang tidak partisan tetapi tetap kritis terhadap semua bentuk praktik politik yang tidak etis, terlepas dari identitas kelompok pemimpin yang terlibat. Sanjaya et al. (2024) menambahkan bahwa keterlibatan Kristen dalam politik harus menggerakkan suara-suara Kristen untuk transformasi politik kontemporer dengan memahami pola perilaku politik yang sehat dan dampaknya dalam dinamika politik sosial. Taliwuna (2025) memperkuat prinsip ini dengan menjelaskan bahwa pendekatan teologis menawarkan kerangka normatif untuk memahami dinamika hubungan agama dan politik, di mana nilai-nilai teologis seperti keadilan, kasih, dan toleransi harus menjadi panduan dalam setiap kebijakan politik yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, prinsip keempat adalah pembangunan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan gereja. Kriswibowo dan Amtiran (2024) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan gereja menjadi isu etis yang semakin penting di era informasi, di mana pemimpin gereja dituntut untuk menjadi teladan dalam hal integritas dan keterbukaan. Palembang (2024) menambahkan bahwa majelis gereja dapat membentuk kelompok-kelompok diskusi, penyebarluasan konten-konten yang bermanfaat, dan penguatan program kerja jemaat untuk menyikapi praktik politik yang tidak sehat seperti *money politics*. Data menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang kuat dapat mencegah pemimpin gereja dari godaan untuk menyalahgunakan otoritas rohani mereka untuk kepentingan politik partisan. Chendralisan dan Sibarani (2025) menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan dan kepekaan teologis dalam menyikapi godaan untuk berpolitik praktis, agar pemimpin gereja tetap setia pada panggilannya sebagai pelayan Firman dan gembala umat yang mengarahkan jemaat kepada nilai-nilai Kerajaan Allah. Kumowal (2025) memperkuat prinsip ini dengan mengusulkan penerapan sistem pemilihan pemimpin yang transparan dan berbasis kriteria spiritual, membangun budaya jemaat yang mendukung kepemimpinan berbasis kasih, serta memperkuat peran gembala sidang sebagai pengawas moral dalam kepemimpinan gereja.

Fenomena ini diperkuat oleh prinsip kelima, yaitu pengembangan kepemimpinan yang kontekstual dan adaptif. Para'pean et al. (2025) menjelaskan bahwa kerangka kerja teoretis untuk navigasi kepemimpinan harus berlandaskan pada tiga pilar: adopsi pola pikir pemimpin sebagai "jembatan" penghubung, fondasi teologis yang kokoh mencakup prinsip teokratis dan model inkarnasional, serta implementasi strategi-strategi praktis seperti pendekatan akulturasi

yang sadar dan komunikasi kontekstual. Parimba (2021) menambahkan bahwa gereja perlu mengembangkan rasionalitas komunikatif yang sistematis untuk melakukan perubahan sosial, termasuk membangun komunikasi yang tidak berhenti untuk proses timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Data menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kontekstual mampu memahami dinamika politik lokal dengan segala kompleksitasnya, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas alkitabiah. Belo dan Rika (2023) menekankan pentingnya etika komunikasi yang mengedepankan cinta, kebaikan, dan rasa hormat terhadap orang lain dalam konteks menjelang pemilu, sehingga dapat menciptakan pemilu yang damai dan kondusif. Implikasinya ialah kepemimpinan yang kontekstual dan adaptif tidak berarti berkompromi dengan standar integritas, melainkan menemukan cara-cara kreatif untuk menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam konteks yang spesifik dengan tetap menjaga empati pastoral terhadap jemaat yang terpolarisasi.

Lebih lanjut, prinsip keenam adalah pembangunan komunitas iman yang sehat dan matang secara spiritual. Nicolas (2020) mengungkapkan bahwa dalam perbedaan dan keberagaman pandangan, gereja-gereja harus belajar dan berusaha saling menerima, saling menghargai, sebab keberagaman akan selalu ada, dan yang diperlukan adalah saling merendahkan hati dan bersatu mencari solusi dengan kerja sama. Kriswibowo dan Amtiran (2024) menambahkan bahwa pemimpin Kristen perlu mengembangkan pendekatan "kebijaksanaan praktis" yang melibatkan *discernment* teologis, analisis situasional, dan pertimbangan konsekuensi, sehingga tidak hanya mengandalkan aturan etis yang kaku tetapi juga mengembangkan kapasitas untuk membuat penilaian etis yang bijaksana dalam situasi yang kompleks. Data menunjukkan bahwa komunitas iman yang matang secara spiritual memiliki resiliensi yang lebih kuat dalam menghadapi polarisasi politik, karena mereka memiliki fondasi iman yang dalam dan pemahaman teologis yang solid tentang hakikat kepemimpinan Kristen. Chanra dan Kasman (2025) menekankan pentingnya memisahkan agama dan politik dalam arti tidak mengidentikkan gereja dengan partai politik tertentu, namun tetap mempertahankan peran gereja sebagai suara moral yang kritis terhadap semua praktik politik. Dengan demikian, prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen untuk menjaga integritas di tengah tekanan politik mencakup komitmen pada standar alkitabiah, pendidikan politik berbasis teologi, peran profetik yang transformatif, sistem akuntabilitas yang kuat, kepemimpinan yang kontekstual dan adaptif, serta pembangunan komunitas iman yang matang, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem kepemimpinan yang mampu menavigasi kompleksitas politik identitas tanpa kehilangan integritas dan empati pastoral.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur dan kajian empiris terdahulu tentang kepemimpinan Kristen, polarisasi politik, dan identitas kelompok dalam masyarakat Toraja, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat paradoks integritas yang mendalam dalam kepemimpinan Kristen Toraja. Komunitas yang secara teologis sangat menekankan integritas sebagai syarat fundamental kepemimpinan justru mengalami pembutaan etika dalam praktik empiris ketika berhadapan dengan pemimpin yang berasal dari identitas kelompok yang sama. Paradoks ini termanifestasi konkrit dalam dinamika pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di mana standar integritas yang biasanya diterapkan secara ketat pada pemimpin dari kelompok lain menjadi longgar dan permisif ketika pemimpin berasal dari klan, keluarga, atau denominasi yang sama, sehingga menciptakan inkonsistensi moral yang signifikan.
2. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pembutaan etika ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor-faktor psikologis, teologis, dan sosiologis. Pada dimensi psikologis, in-group bias dan disonansi kognitif mendorong anggota komunitas untuk lebih toleran terhadap kesalahan pemimpin sendiri dan melakukan rasionalisasi ketika dihadapkan pada bukti inkonsistensi etika. Pada dimensi teologis, pemahaman dualisme yang memisahkan ranah sakral dan sekuler serta interpretasi yang permisif memungkinkan komunitas untuk membenarkan kompromi etis dalam ranah politik. Pada dimensi sosiologis, struktur klan Toraja yang kuat dan tekanan konformitas kelompok mengutamakan loyalitas di atas pertimbangan etis objektif.
3. Penelitian ini merumuskan enam prinsip kepemimpinan Kristen untuk menjaga integritas di tengah tekanan politik tanpa kehilangan empati pastoral, yaitu: komitmen pada standar integritas alkitabiah yang tidak dapat ditawar-tawar, pengembangan pendidikan politik berbasis teologi, peneguhan peran profetik gereja yang kritis dan transformatif, pembangunan sistem akuntabilitas dan transparansi, pengembangan kepemimpinan yang kontekstual dan adaptif, serta pembangunan komunitas iman yang matang secara spiritual. Keenam prinsip ini secara sinergis membentuk ekosistem kepemimpinan yang mampu menavigasi kompleksitas politik identitas sambil mempertahankan integritas moral dan kesatuan komunitas.

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan teologi kepemimpinan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika psikologi sosial dan realitas sosiokultural, serta implikasi praktis bagi pemimpin gereja dalam mengembangkan strategi pastoral yang sensitif

namun tegas. Saran penelitian meliputi: pertama, pengembangan program pendidikan politik berbasis teologi yang komprehensif di gereja-gereja Toraja melalui katekisasi dan pelatihan kepemimpinan agar jemaat memiliki pemahaman matang tentang penerapan prinsip-prinsip iman dalam konteks politik praktis; kedua, pembangunan sistem akuntabilitas gereja yang efektif dengan mekanisme evaluasi kritis terhadap keterlibatan pemimpin dalam politik partisan; ketiga, penelitian empiris lapangan melalui etnografi atau studi kasus untuk memvalidasi kerangka konseptual yang dibangun; dan keempat, penelitian komparatif dengan komunitas Kristen di wilayah lain untuk memahami variasi regional dalam dinamika paradoks integritas kepemimpinan.

DAFTAR REFERENSI

- Afni, J. (2022). *Gereja dan politik: Kajian teologis terhadap pemikiran Pdt. Daud Sangka' dan relevansinya bagi warga Gereja Toraja* [Disertasi doktoral, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja].
- Allodatu, P. (2010). *Masyarakat Kristen dan politik: Suatu tinjauan teologis-sosiologis mengenai pemahaman masyarakat Kristen tentang politik di Lembang Sikuku' Kecamatan Kapala Pitu Kabupaten Toraja Utara dan implikasinya dalam pemilihan umum* [Disertasi doktoral, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja].
- Belo, M. L. (2024). *Politik identitas: Identitas manusia Toraja Kristen di tengah komodifikasi budaya Toraja melalui turisme* [Disertasi doktoral, Universitas Kristen Indonesia Toraja].
- Belo, Y., & Rika, S. (2023). Peran etika komunikasi dalam konteks pemilihan umum tahun 2024: Kajian etika Kristen. *Jurnal Luxnos*, 9(2), 268–281. <https://doi.org/10.47304/jl.v9i2.385>
- Chanra, M., & Kasman, S. (2025). Memisahkan agama dan politik: Sebuah tinjauan teoretis dan praktis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1247–1256.
- Chendralisan, L., & Sibarani, J. M. (2025). Implikasi seorang pemimpin gereja melakukan kampanye politik dalam mendukung pasangan calon tertentu. *Jurnal Teologi Rahmat*, 11(1), 43–53.
- Kriswibowo, P. A., & Amtiran, A. A. (2024). *Teologi kepemimpinan Kristen: Membentuk pemimpin yang Alkitabiah di era modern*. CV. Mega Press Nusantara.
- Kumowal, R. L. (2025). Politik kekuasaan dalam gereja: Perspektif teologis atas dampaknya terhadap kepemimpinan jemaat. *Orthotomeo: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2, 52–73. <https://doi.org/10.71304/d7mfh172>
- Linansera, Z. R., Siahaan, S. S. S., Sutjiono, R. J., & Nainggolan, L. (2024). Gereja di tengah krisis demokrasi: Menakar ulang suara profetik bagi bangsa. *Semper Reformanda*, 6(1), 12–22.
- MacArthur, J. (2009). *Kitab kepemimpinan*. BPK Gunung Mulia.

- Nicolas, D. G. (2020). Analisis pandemi COVID-19 dan pertajaman polarisasi gereja di Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 696–702. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.165>
- Palembangan, P. (2024). *Analisis peran majelis gereja dalam menghadapi money politic Gereja Toraja Jemaat Batang Palli Klasik Sa'dan Matallo* [Disertasi doktoral, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja].
- Pangkey, A. S. (2025). Pemahaman dualisme dan perspektif tentang kekuasaan: Terhadap sikap sosial politik orang Kristen. *Transformatio: Jurnal Teologi, Pendidikan, dan Misi Integral*, 2(2), 133–148.
- Para'pean, Y. R., Toda, I., Paembong, L., Ludiana, L., & Tonglolangi, R. (2025). Dualitas peran pemimpin Kristen menavigasi kepemimpinan adat dan tuntutan organisasi modern. *Berkat: Jurnal Pendidikan Agama dan Katolik*, 2(2), 95–110.
- Parimba, J. (2021). Rasionalitas komunikasi sebagai pilihan gereja dalam melawan politik uang di Toraja. *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v1i1.8>
- Puasa, A., Noya, M. A., & Nanuru, R. F. (2025). Peran politis Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 7(1), 361–369. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.439>
- Rerung, A. E., & Attu, J. (2023). Sikap gereja terhadap partisipasi politik dan relevansinya bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale. *Kinaa: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.34307/kinaa.v4i1.48>
- Roni, R., & Yosbekasa, Y. (2024). Teologi menggugat sistem demokrasi dan politik di Indonesia. *Melo: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(2), 115–127. <https://doi.org/10.34307/mjsaa.v4i2.168>
- Sallata, L. (2024). *Analisis dampak politik praktis terhadap persekutuan warga jemaat di Gereja Toraja Jemaat Buale' Klasik Mengkendek Utara* [Disertasi doktoral, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja].
- Sanjaya, Y., Huatama, V. A., & Tafonao, T. (2024). Kepemimpinan gereja dan politik: Menggerakkan suara-suara Kristen untuk transformasi politik kontemporer. *Ambassadors: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 103–115.
- Sepi, D. (2019). *Peran politik warga Gereja Toraja Jemaat Hermon Manipi' Klasik Bittuang Se'seng* [Disertasi doktoral, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja].
- Sidjabat, B. S. (2019). Meretas polarisasi pendidikan Kristiani: Sebuah pengantar tentang arah pendidikan Kristiani di gereja, akademik, dan ruang publik. *Indonesian Journal of Theology*, 7(1), 7–24. <https://doi.org/10.46567/ijt.v7i1.2>
- Sihotang, H. T., Sihotang, D., & Sihotang, M. (2023). Exploring the influence of Christianity on political behavior in contemporary society: A comparative study. *Ministries and Theology*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.35335/69ett422>
- Sijabat, N. (2019). *Hidup yang bermakna: Prinsip-prinsip kekristenan untuk mahasiswa Kristen di universitas*. Penerbit Adab.
- Silalahi, P., & Marbun, R. C. (2025). Pemilu damai dan demokrasi dari perspektif etika Kristen. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2847–2851.

- Sumual, E. N., & Arifianto, Y. A. (2025). Keteladanan kepemimpinan Paulus sebagai strategi teologi pemimpin Kristen era digital dan post truth. *Ritornera: Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia*, 5(2), 199–212.
- Taliwuna, M. (2025). Relasi agama dan politik di Indonesia: Pendekatan teologis Kristen terhadap dinamika demokrasi. *Shamayim: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 27–38.
- Topayung, S. L. (2025). *Pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik*. Penerbit KBM Indonesia.
- Yosafat, B. (2021). *Integritas pemimpin pastoral*. PBMR ANDI.
- Yosep, Y. (2024). *Keikutsertaan pendeta dalam politik: Studi perbandingan Gereja Toraja Mamasa dengan pemikiran John Calvin* [Disertasi doktoral, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja].